

Penyusunan Enterprise Arsitektur SPBE Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Program Perencanaan Pengembangan dan Evaluasi Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat

Penulis Tiofenny Angelina¹, Asti Amalia Nur Fajrillah², Ridha Hanafi³
^{1,2,3}Telkom University

¹tfnyngln@gmail.com, ²astiamalia@telkomuniversity.ac.id, ³ridhanafi@telkomuniversity.ac.id

ABSTRAK. Kemajuan teknologi informasi, dalam bentuknya yang sekarang, terkait erat dengan masyarakat modern, dan pemerintah sebagai penyedia layanan untuk menjalankan misi pemerintah secara lebih terbuka, efektif dan efisien, serta untuk memfasilitasi akses. tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah menghasilkan rancangan blueprint Arsitektur Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Layanan SPBE (Tidak termasuk Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE). Pada penelitian ini memiliki sasaran 'Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel'. Dengan model konseptual untuk mempermudah peneliti ddalam menjelaskan konsep proses penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian.

Kata Kunci: Teknologi Informasi; Governance, SPBE

ABSTRACT. Advances in information technology, in its current form, are closely related to modern society, and the government as a service provider to carry out government missions more openly, effectively and efficiently, as well as to facilitate access. The objective to be achieved from this study is to produce a blueprint design for the Electronic-Based Government Architecture of the West Java Provincial Government in the domains of Business Processes, Data and Information, SPBE Applications, and SPBE Services (Excluding SPBE Infrastructure and SPBE Security). This study has the target of 'The realization of smart, clean and accountable governance innovations'. With a conceptual model to make it easier for researchers to explain the concept of the research process from the beginning of the research to the end of the research.

Keywords: Information Technology; Governance, SPBE

1. PENDAHULUAN

Teknologi informasi dan komunikasi ini, membawa pengaruh yang cukup besar terhadap pengelolaan pemerintahan yaitu adanya sistem pelayanan publik yang dikembangkan dengan pemanfaatan jaringan internet (Alhari et al., 2022). Salah satu manfaat yang dirasakan masyarakat adalah adanya pelayanan publik bagi penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif serta pelayanan publik yang transparan. (Hammer dan Champy, 2016). Kemajuan teknologi informasi, dalam bentuknya yang sekarang, terkait erat dengan masyarakat modern, dan pemerintah sebagai penyedia layanan untuk menjalankan misi pemerintah secara lebih terbuka, efektif dan efisien (Alhari et al., 2021), serta untuk memfasilitasi akses. Informasi, terutama tentang pemerintah.

Melihat hasil survei United Nations E-Government Development Index (EGDI) tahun 2020, Indonesia berada di peringkat 88 dari 193 negara. Dibandingkan dengan tahun 2019 posisi Indonesia meningkat 19 peringkat menjadi 88 dengan peringkat sebelumnya di posisi 107 pada tahun 2018. Namun skor rata-rata EGDI Indonesia masih jauh dari negara-negara yang ada di Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) seperti Thailand, Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam. Hasil peringkat EGDI yang merujuk pada table diatas menunjukkan bahwa perkembangan e-government di Indonesia masih harus terus ditingkatkan. Dengan hadirnya e-government sejak tahun 90-an, hal ini tentunya menjadi suatu tantangan bagi pemerintah Indonesia untuk terus meningkatkan predikat index Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Predikat indeks SPBE diatur dalam PERMENPAN nomor 59 sebagai pemeringkatan SPBE agar pelayanan SPBE dapat memenuhi kriteria kepatuhan untuk mencapai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat memperoleh indeks sebesar 3,12 dengan predikat 'Baik'. Dilansir dari web spbe.go.id permasalahan yang menjadi penyebab Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum mencapai bobot yang diinginkan yaitu belum adanya standarisasi proses bisnis yang menjamin konsistensi dari layanan yang dimiliki sehingga menghambat kinerja organisasi karena proses bisnis yang ada masih susah untuk dipahami

dan proses bisnis yang ada tidak dapat mendukung layanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terintegrasi.

Penelitian ini akan berfokus pada perancangan SPBE menggunakan framework TOGAF ADM 9.2 dan menerapkan aturan penyusunan proses bisnis sesuai dengan Permenpan No. 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah pada sasaran 'Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel' dan difokuskan pada domain Proses Bisnis, Data dan Informasi, Aplikasi SPBE, dan Layanan SPBE (Tidak termasuk Infrastruktur SPBE dan Keamanan SPBE).

2. METODE

2.1 *Arsitektur Enterprise*

Arsitektur ialah sesuatu perencanaan yang diwujudkan dengan model serta foto dari bagiankomponen dari suatu dengan bermacam sudut pandang(Surendro 2009). Enterprise Architecture dibutuhkan sebab ialah selaku bawah sistem organisasi yang terdiri dari sekumpulan komponen yang mempunyai ikatan satu sama yang lain dan mempunyai keterhubungan dengan area sistem, serta mempunyai ketentuan buat perancangan serta penilaian(The Open Group, 2009).

2.2 *Konsep E-Government*

Sederhananya, Heeks (1999) mendefinisikan e-government sebagai "suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan teknologi informasi (TI) untuk melayani masyarakat." Kehadiran pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada semua pihak yang membutuhkan hubungan pemerintahan yang bersih, korupsi dan sejenisnya.

Kerangka kerja arsitektur industri merupakan kerangka kerja ataupun perlengkapan buat membuat serta meningkatkan arsitektur industri. Manfaatnya buat mengklasifikasikan data lingkungan. Dikala mempraktikkan arsitektur industri, lebih baik serta lebih gampang bila Kamu menjajaki ide- ide tertentu. Kerangka kerja ini diucap arsitektur kerangka kerja industri. Kerangka arsitektur merupakan perlengkapan yang bisa digunakan buat meningkatkan bermacam arsitektur yang berbeda. Kita butuh menarangkan gimana merancang sistem data dalam makna kumpulan blok bangunan serta menampilkan gimana blok bangunan ini digabungkan. Kerangka kerja EA memusatkan serta seluruhnya mencakup pemecahan desain Anda, serta arsitektur opsi yang membolehkan pengembangan masa depan buat penuh kebutuhan bisnis.

Dengan membandingkan hasil implementasi SPBE atau *e-Government* di negara Korea dan Denmark dengan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa Indonesia sudah tertinggal jauh, dilihat dari komponen infrastruktur telekomunikasi Denmark yang memperlihatkan bahwa hanya Denmark yang berhasil meraih nilai tertinggi dan memiliki tingkat keberhasilan atau kemampuan adopsi pengembangan e-Government yang jauh lebih cepat dalam penyediaan infrastruktur telekomunikasi berbeda dengan Indonesia yang masih menghadapi masalah tersebut dimana belum semua dari masyarakat Indonesia yang bisa menggunakan perangkat elektronik dengan baik.

2.3 *Model Konseptual*

Kerangka konseptual bertujuan untuk mengidentifikasi esensi tujuan penelitian dan keterkaitannya. Model konseptual adalah model yang menjelaskan konsep proses penelitian dari awal penelitian sampai akhir penelitian. Angka ini memiliki tiga elemen: input, proses, dan output. Untuk model konseptual perancangan SPBE pada sasaran 'Terwujudnya inovasi tata kelola pemerintahan yang smart, bersih dan akuntabel' Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 *Fase Preliminary*

Fase Preliminary Fase ini bertujuan untuk menetapkan kapabilitas arsitektur yang sesuai dengan organisasi melalui prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip tersebut akan dijadikan landasan perancangan pada setiap domain arsitektur .

3.1.1 *Principles Catalog*

Principles Catalog berguna untuk memetakan prinsip pengembangan arsitektur yang dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

Tabel 1. *Principles Catalog*

| No. | Domain | Prinsip | Definisi | No. | Domain | Prinsip | Definisi |
|-----|----------------------------|---|--|-----|-----------|---|--|
| 1 | Proses Bisnis | <i>Primacy of Principles</i> | Seluruh aktivitas bisnis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat harus sesuai dengan prinsip arsitektur TI organisasi. | 3 | Aplikasi | <i>Technology Independent</i> | Aplikasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat tidak bergantung pada teknologi tertentu, sehingga aplikasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dapat dioperasikan walaupun tanpa memperhatikan platform teknologi tertentu. |
| | | <i>Information Management is Everybody's Business</i> | BAPPEDA Provinsi Jawa Barat melibatkan seluruh entitas organisasi untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan pada proses manajemen informasi TI untuk mencapai tujuan bisnis organisasi. | | | <i>Ease-of-Use</i> | Aplikasi mudah untuk digunakan dan mampu mendukung aktivitas bisnis organisasi. |
| | | <i>Commonn Use Application</i> | BAPPEDA Provinsi Jawa Barat memanfaatkan aplikasi yang sudah diterapkan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dibandingkan mengembangkan aplikasi baru yang bersifat serupa atau duplikasi dari sisi fungsionalitas. | 4 | Layanan | Sederhana | BAPPEDA Provinsi Jawa Barat mampu memberikan layanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi pengguna maupun penyedia layanan. |
| | | <i>Service Oriented</i> | Perancangan Arsitektur TI pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat akan berfokus untuk menyediakan layanan yang menyeluruh, mudah diakses, dan terintegrasi. | | | Partisipatif | Perencanaan hingga penyelenggaraan layanan melibatkan pengguna dan penyedia layanan untuk berdiskusi hingga mencapai kesepakatan |
| | <i>Compliance with Law</i> | BAPPEDA Provinsi Jawa Barat mematuhi hukum, | | | Akuntabel | Layanan dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan. | |

| No. | Domain | Prinsip | Definisi | No. | Domain | Prinsip | Definisi |
|-----|--------------------|---|--|-----|--------|---------------|---|
| | | | aturan, maupun kebijakan yang berlaku dalam melaksanakan proses manajemen informasi TI. | | | | |
| 2 | Data dan Informasi | <i>Data is an Asset</i> | Data adalah aset penting yang memiliki value bagi organisasi dan harus dikelola dengan tepat. | | | Berkelanjutan | Pengembangan layanan dilakukan secara berkala sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. |
| | | <i>Data is an Shared</i> | Data dialokasikan ke seluruh unit kerja dan organisasi. Oleh karena itu, pengguna aplikasi BAPPEDA Provinsi Jawa Barat dapat mengakses sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang aktivitas bisnis. | | | Transparansi | Layanan terbuka bagi seluruh lapisan pengguna layanan |
| | | <i>Data is Accessible</i> | Data dapat diakses oleh pihak terkait sesuai kebutuhan untuk menjalankan operasional unit kerja BAPPEDA Jabar. | | | Keadilan | Layanan dapat dijangkau pengguna layanan tanpa memandang perbedaan status ekonomi, lokasi geografis, dan kapabilitas fisik juga mental. |
| | | <i>Data Trustee</i> | BAPPEDA Provinsi Jawa Barat mempunyai stakeholder yang bertanggung jawab atas kualitas setiap data BAPPEDA Provinsi Jawa Barat. | | | | |
| | | <i>Common Vocabulary and Data Definitions</i> | Pendefinisian data dilakukan secara konsisten dengan menggunakan istilah yang dapat dipahami, juga tersedia bagi semua pengguna | | | | |
| | | <i>Data Security</i> | Data dilindungi dari penggunaan yang | | | | |

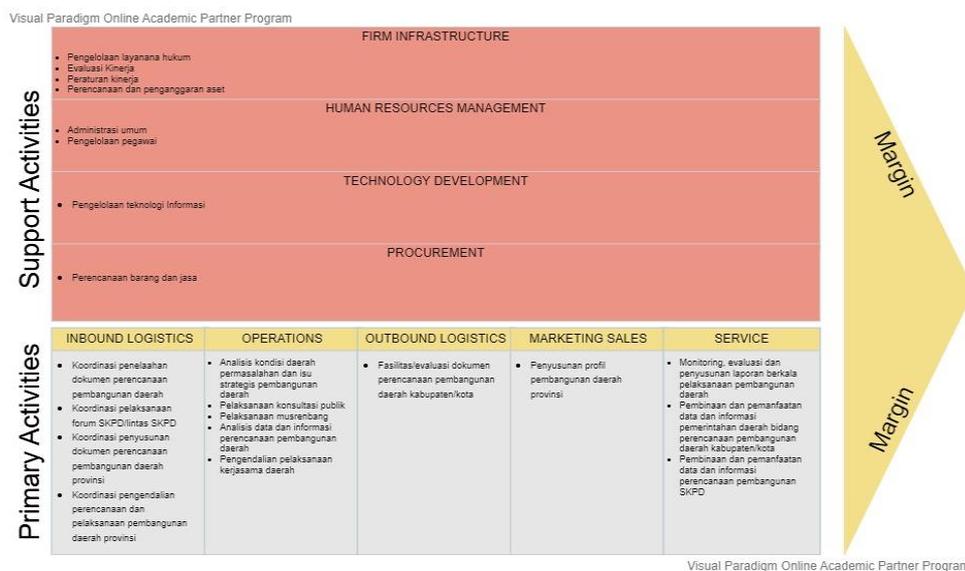
| No. | Domain | Prinsip | Definisi | No. | Domain | Prinsip | Definisi |
|-----|--------|---------|--|-----|--------|---------|----------|
| | | | tidak sah. Klasifikasi keamanan data meliputi perlindungan informasi pra-keputusan, sensitivitas, dan hak milik. | | | | |

3.2 Fase Architecture Vision

Fase Architecture Vision adalah fase awal dalam perancangan arsitektur perusahaan. Dalam fase ini terdapat beberapa artefak yang digambarkan mengenai stakeholder, rantai nilai atau value chain.

3.2.1 Value Chain

Value Chain Diagram membantu penggambaran value organisasi secara high level didasarkan pada aktivitas bisnis dan interaksi organisasi dengan eksternal. Penggambaran tersebut dapat diklasifikasikan melalui dua kategori, yaitu primary activities atau fungsi utama dan support activities atau fungsi pendukung

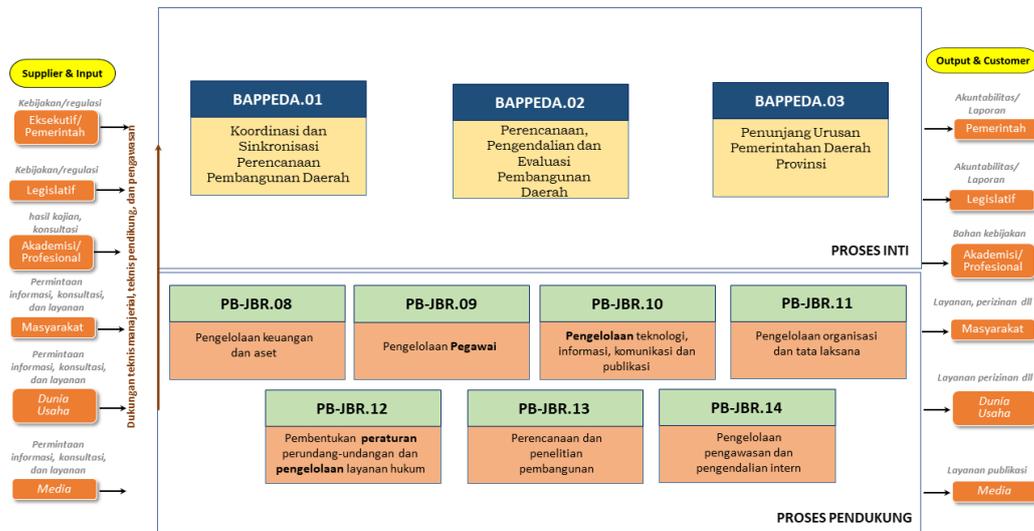


Gambar 2. Value Chain Diagram

3.3 Arsitektur Proses Bisnis

Setelah Architecture Vision, fase berikutnya adalah Arsitektur Proses Bisnis. Melalui Perpres No. 95 Tahun 2018, proses bisnis diartikan sebagai sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing. Adapun pada fase ini memuat deskripsi arsitektur proses bisnis existing dan targeting

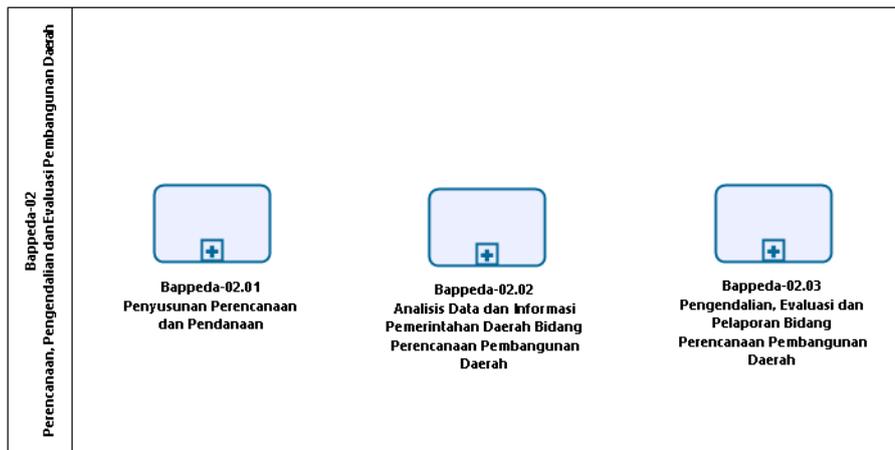
3.3.1 Peta Proses Bisnis BAPPEDA Provinsi Jawa Barat



Gambar 3. Peta Proses Bisnis BAPPEDA Prov.Jawa Barat

3.3.2 Peta Proses Bisnis Level 1

Berikut merupakan Peta Proses Bisnis Level 1 pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat (Proses DP3AKB.02).



Gambar 4. Peta Proses Bisnis Level 1 pada BAPPEDA Provinsi Jawa Barat

3.4 Arsitektur Data dan Informasi

Setelah Arsitektur Proses Bisnis, terdapat Arsitektur Data dan Informasi yang ditujukan untuk mendukung Arsitektur Proses Bisnis dan Fase Architecture Vision. Pada tahap ini, akan dilakukan pengidentifikasian kebutuhan data organisasi.

3.4.1 Katalog Entitas Data

Katalog Entitas Data berisikan identifikasi data yang digunakan oleh organisasi, mulai dari entitas data hingga komponen datanya. Pada katalog ini terdapat metamodel entitas data, komponen logical data, dan komponen physical data.

Keterangan :

- Penambahan Objek
- Pengembangan Objek

Tabel 2. Katalog Entitas Data

| No. | Entitas Data | Logical Data | Physical Data | Type Data |
|--|---------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|
| Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | | | | |
| 1. | Pegawai | Informasi mengenai data pegawai | Tabel Pegawai | Master Data |
| 2. | Unit Kerja BAPPEDA | Informasi mengenai unit kerja BAPPEDA | Tabel UnitKerjaBAPPEDA | Master Data |
| 3. | Perangkat Daerah | Informasi mengenai perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota | Tabel PerangkatDaerah | Master Data |
| 4. | Instansi | Informasi mengenai instansi atau lembaga yang berhubungan dengan penyediaan program BAPPEDA | Tabel Instansi | Master Data |
| 5. | Data analisis koordinasi daerah | Informasi mengenai analisis koordinasi daerah | Tabel AnalisisKoordinasiDaerah | Transactional Data |
| 6. | Data Laporan | Memuat informasi mengenai: 1. Laporan hasil kebijakan analisis kondisi daerah 2. Dokumen laporan kebijakan profil pembangunan daerah 3. Laporan pelaksanaan pembangunan daerah 4. Laporan penyusunan bahan pembangunan daerah 5. Laporan profil pembangunan daerah 6. Dokumen laporan konsultasi publik | Tabel Laporan | Transactional Data |
| 7. | Dokumen PPD | 1. Informasi mengenai perencanaan pembangunan daerah 2. Dokumen Ketetapan perencanaan pembangunan daerah | Tabel DokPPD | Transactional Data |
| 8. | Dokumen Cascading | Informasi mengenai dokumen cascading yang memuat: 1. Hasil pemetaan kebijakan pelaksanaan konsultasi publik 2. Data kebijakan koordinasi forum SKPD 3. Data kebijakan koordinasi penyusunan pembangunan daerah 4. Data kebijakan pelaksanaan konsultasi publik | Tabel DokCascading | Transactional Data |

| | | | | |
|-----|---------------------------------------|---|---------------------|--------------------|
| 9. | Data Musrenbang | Informasi mengenai musyawarah perencanaan pembangunan | Tabel Musrenbang | Transactional Data |
| 10. | Data SKPD | 1. Informasi mengenai pembinaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 2. Informasi mengenai draft SKPD | Tabel SKPD | Transactional Data |
| 11. | Data Pemerintahan | Informasi mengenai data pemerintahan dan kementerian | Tabel Pemerintahan | Transactional Data |
| 12. | Dokumen Pengendalian Kerjasama Daerah | Informasi mengenai pengendalian kerja sama daerah | TabelDokPKD | Transactional Data |
| 13. | Dokumen Evaluasi Pembangunan Daerah | Informasi yang memuat tentang evaluasi pembangunan daerah | Tabel DokEvaluasiPD | Transactional Data |
| 14. | Dokumen SIPD | Informasi yang memuat tentang dokumen SIPD | Tabel DokSIPD | Transactional Data |

3.5 Arsitektur Aplikasi

Arsitektur Aplikasi berfungsi untuk memuat pemetaan dan pendefinisian aplikasi yang digunakan didalam organisasi/instansi aplikasi tersebut memuat gambaran aplikasi eksisting maupun targeting.

3.5.1 Katalog Aplikasi

Katalog Aplikasi digunakan untuk mendeskripsikan aplikasi yang digunakan BAPPEDA Provinsi Jawa Barat untuk menunjang Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Pada katalog ini, akan memuat aplikasi existing atau yang sudah ada dan aplikasi target yang akan dikembangkan ataupun ditambahkan

Keterangan:

| | |
|--|--------------------|
| | Penambahan Objek |
| | Pengembangan Objek |

Tabel 3. Katalog Aplikasi

| Nama Aplikasi | Deskripsi | Penyedia Aplikasi | Unit Kerja Terkait |
|---------------|---|--------------------------------|----------------------------------|
| SIPD | Suatu Sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen rencana pembangunan daerah secara elektronik (Permendagri No. 98 Tahun 2018). Sistem Informasi ini membantu penyediaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah, penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pembangunan daerah secara Elektronik yang pelaksanakannya oleh pemerintah daerah secara nasional. | KemenDagri | Bidang Perencanaan dan Pendanaan |
| E-Monev | Sistem informasi monitoring dan evaluasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang memuat realisasi dan capaian kinerja Program dan kegiatan APBD sebagai bahan dalam penyusunan evaluasi | Pemerintah Provinsi Jawa Barat | Bidang Data dan Informasi |

| | | | |
|---------|---|-----------------------------|--|
| | kinerja pembangunan untuk mendukung perumusan kebijakan yang berkualitas dalam perencanaan pembangunan di Jawa Barat | | |
| SIKAPID | Sikapid merupakan singkatan dari Sistem Informasi Analisis Perencanaan Informasi Data. Aplikasi ini dimanfaatkan sebagai wadah untuk menampung analisis data dan informasi yang digunakan dalam pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat. | BAPPEDA Provinsi Jawa Barat | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |

3.6 Arsitektur Layanan

kategori layanan tersebut berada di level Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, yang mana merujuk pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat

3.6.1 Katalog Layanan

Katalog Layanan memuat pemetaan layanan pada objek penelitian

Tabel 4. *Katalog Layanan*

| Layanan di Pemerintah Provinsi | Layanan BAPPEDA | Aplikasi Pendukung | Penyedia Layanan |
|--|---|--------------------------|---|
| Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan | SIPD | Bidang Perencanaan dan Pendanaan |
| | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. SIKAPID | Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| | Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. E-Monev 2. SIKAPID | 1. Bidang Data dan Informasi 2. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | - | Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) | - | Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Manusia) |
| | Koordinasi Perencanaan Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan | - | 1Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan. |

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan melakukan perancangan Enterprise Architecture (EA) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Jawa Barat untuk Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, didapati bahwa penelitian ini menghasilkan blueprint EA yang dirancang dengan menerapkan best practice TOGAF ADM dan PermenPAN RB No. 19 Tahun 2018, serta disusun melalui Fase Preliminary, Fase Architecture Vision, Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur

Aplikasi, dan Arsitektur Layanan. Setiap tahapan tersebut menghasilkan input dan output terhadap perancangan model EA guna menjadi solusi permasalahan yang dihadapi organisasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Alhari, M. I., Febriyani, W., Jonson, W. T., & Fajrillah, A. A. N. (2021). Perancangan Smart Village Platform Aplikasi Edukatif untuk Pengentasan Stunting serta Monitoring Kesehatan Ibu Hamil. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 15(1), 51.
<https://doi.org/10.32815/jitika.v15i1.562>
- Alhari, M. I., Nuraliza, H., Amalia, A., & Fajrillah, N. (2022). Implementasi Aplikasi Smart City Pada Management Informasi Mitigasi Bencana Kekeringan. *Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Asia*, 16(1), 9–18.
- Hevner, A., & Chatterjee, S. (2010). Design Science Research in Information Systems. In A. Hevner, & S. Chatterjee, *Design Research in Information Systems* (pp. 9-22). New York: Springer Science+Business Media.
- Arief, A., & Abbas, M. Y. (2021). Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro Volume 8. No 1*, 1-6.
- Bounty, A. A., Koniyo, M. H., & Novian, D. (2019). Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menggunakan E-Government Maturity Model (Kasus di Pemerintahan Kota Gorontalo). *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 23 No. 1*, 16-24.
- Defriani, M., & Resmi, M. G. (2019). E-Government Architectural Planning Using Federal Enterprise Architecture Framework in Purwakarta Districts Government. *2019 Fourth International Conference on Informatics and Computing (ICIC)*.
- Ha, H., & Coghill, K. (2008). E-Government in Singapore — A Swot and Pest Analysis. *Asia-Pacific Social Science Review*.
- Ott, D. A., Hanson, F., & Krenjova, J. (2018). *Introducing Integrated EGovernment in Australia*. Canberra: Australian Strategic Policy Institute.
- Rouhani, B. D., Nikpay, F., Mahrin, M. N., & Nikfard, P. (2013). A Comparison Enterprise Architecture Implementation Methodologies. *2013 International Conference on Informatics and Creative Multimedia*, 1-6.
- Peraturan Menteri PAN dan RB No. 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. (2018).
- Peraturan Menteri PAN dan RB No. 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (2018).